
Praktik Nepotisme pada Pemerintahan Desa

Irman Puansah

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia.

Email: Irman.puansah@um-tapsel.ac.id

Abstract. *Nepotism in village governance is a phenomenon that negatively impacts government administration, public services, and rural development. This study aims to analyze the practice of nepotism in village governance through the lens of critical sociology, particularly within the theoretical frameworks of Michel Foucault and Karl Marx. Using a literature review approach, this research identifies that nepotism in village governance is often legitimized through patronage culture and kinship ties, which hinder meritocracy and create social inequality. The findings reveal that nepotistic practices lead to weak transparency, poor public service delivery, and increasing public distrust in village governance. From Foucault's perspective, nepotism is part of a power mechanism that sustains the dominance of certain groups, while Marx highlights nepotism's role in maintaining social and economic stratification. Therefore, reforms in the recruitment system for village officials, enhanced transparency, and the implementation of meritocracy-based governance principles are necessary to mitigate the negative impacts of nepotism in village governance.*

Keywords: *nepotism, village governance, critical sociology, power, meritocracy*

Abstrak. Nepotisme dalam pemerintahan desa merupakan fenomena yang berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik nepotisme dalam pemerintahan desa melalui perspektif sosiologi kritis, khususnya dalam kerangka pemikiran Michel Foucault dan Karl Marx. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi bahwa nepotisme dalam pemerintahan desa sering kali dilegitimasi melalui budaya patronase dan kekerabatan, yang menghambat meritokrasi serta menciptakan ketimpangan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nepotisme berdampak pada lemahnya transparansi, buruknya pelayanan publik, serta meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Dalam perspektif Foucault, nepotisme merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan yang mempertahankan dominasi kelompok tertentu, sedangkan Marx menyoroti peran nepotisme dalam mempertahankan stratifikasi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem perekrutan aparatur desa, peningkatan transparansi, serta penerapan prinsip pemerintahan yang berbasis meritokrasi untuk mengatasi dampak negatif dari praktik nepotisme dalam pemerintahan desa.

Kata kunci: nepotisme, pemerintahan desa, sosiologi kritis, kekuasaan, meritokrasi

1. PENDAHULUAN

Nepotisme dalam pemerintahan desa merupakan salah satu isu yang sering menjadi perhatian dalam studi tentang tata kelola pemerintahan. Praktik nepotisme ini biasanya ditandai dengan pengangkatan atau pemberian posisi strategis kepada kerabat dekat, baik dalam struktur pemerintahan desa maupun dalam proyek-proyek desa. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena berpotensi mengganggu prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi. Selain itu, nepotisme juga dapat menciptakan ketimpangan sosial dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah desa.

Nepotisme sendiri adalah praktik memberikan keistimewaan, perlakuan khusus, atau keuntungan kepada anggota keluarga, kerabat, atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, atau prinsip meritokrasi dalam hal pekerjaan, posisi, atau akses ke

sumber daya (Fajar & K, 2023), (Hariyanto, 2012), (Tory & Hanum, 2025), (Ayu Linanda, 2020), (Nurul, 2022).

Dalam konteks desa, nepotisme sering kali dilegitimasi melalui norma budaya atau adat yang menekankan hubungan kekeluargaan dan patronase. Hal ini dapat dilihat dalam pemilihan kepala desa, pengangkatan perangkat desa, atau alokasi sumber daya desa yang cenderung berpihak kepada kelompok tertentu. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat umum tetapi juga menghambat pembangunan desa secara keseluruhan.

Pendekatan sosiologi kritis digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana praktik nepotisme dalam pemerintahan desa merefleksikan ketimpangan kekuasaan dan reproduksi struktur sosial yang tidak adil. Sosiologi kritis berupaya mengungkap bagaimana struktur kekuasaan yang ada sering kali diabadikan melalui institusi formal maupun informal, termasuk dalam level pemerintahan desa. Dengan memahami praktik nepotisme melalui kerangka sosiologi kritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pola-pola kekuasaan bekerja dalam masyarakat desa dan bagaimana strategi dapat dirumuskan untuk mengurangi dampak negatif dari praktik tersebut.

Sosiologi kritis menurut Michel Foucault menyoroiti hubungan erat antara pengetahuan dan kekuasaan, di mana pengetahuan tidak netral, tetapi selalu terkait dengan relasi kekuasaan yang bersifat produktif. Kekuasaan hadir dalam semua relasi sosial dan tersebar melalui institusi seperti pendidikan, medis, dan penjara, dengan tujuan menciptakan kontrol sosial melalui norma dan disiplin. Foucault melihat kekuasaan bukan hanya milik negara, tetapi ada di mana-mana sebagai bagian dari hubungan sosial yang menciptakan individu patuh. Melalui konsep kekuasaan-pengetahuan, disiplin, dan kehendak untuk kebenaran, Foucault mengungkap bagaimana struktur sosial dan norma tertentu diciptakan, dipertahankan, dan dilegitimasi untuk melanggengkan kekuasaan (Darmansyah A et al., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa nepotisme dalam pemerintahan desa sering kali dipicu oleh lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat pendidikan aparat desa, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya (Kaffah et al., 2023) Nepotisme dalam pemerintahan desa dipicu oleh hubungan kekeluargaan, favoritisme, kurangnya transparansi, penyalahgunaan kekuasaan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Kepala desa cenderung mengangkat kerabat atau orang terdekat tanpa mempertimbangkan kapabilitas, menjalankan rekrutmen secara tertutup, serta menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan kendali atas sumber daya desa. Akibatnya, masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, yang memicu konflik dan ketidakpuasan. sementara (Hasibuan & Ivanna, 2024) Nepotisme dalam pemerintahan desa dipicu oleh dinamika

kekuasaan lokal, di mana kedekatan dengan kepala desa menentukan akses jabatan dan sumber daya. Struktur sosial ekonomi juga berperan, dengan kelompok dominan mempertahankan kontrol atas keputusan desa. Selain itu, budaya politik patronase mendorong pengangkatan berdasarkan loyalitas, bukan kompetensi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas serta masa jabatan kepala desa yang panjang semakin memperkuat praktik ini, memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Selanjutnya (Habibullah, 2024) menyebutkan bahwa Nepotisme dalam pemerintahan desa dipicu oleh pengaruh politik, kewenangan kepala desa, dan insentif ekonomi seperti Tanah Kas Desa (TKD). Kurangnya transparansi dan minimnya pengawasan juga memperburuk praktik ini. Untuk mengatasinya, diperlukan seleksi yang lebih transparan dan profesional agar pemerintahan desa berjalan adil dan bebas dari kepentingan pribadi.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur yang mengacu pada berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan data sekunder lainnya. Kajian literatur ini akan mengidentifikasi pola-pola nepotisme dalam pemerintahan desa, faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut, serta dampaknya terhadap pembangunan desa. Nepotisme dalam pemerintahan desa dapat menghambat pembangunan desa karena praktik ini mengutamakan hubungan keluarga dan kedekatan pribadi dibandingkan dengan kompetensi dan meritokrasi. Di Desa Serosah, praktik nepotisme dilakukan oleh kepala desa dengan memberikan jabatan kepada anak, kerabat, dan orang-orang dekatnya tanpa melalui proses seleksi yang transparan. Hal ini menyebabkan pengelolaan organisasi desa, seperti BUMDes, PAUD, MDA, dan organisasi kepemudaan, tidak berjalan dengan baik karena dipimpin oleh individu yang tidak memiliki kapasitas yang memadai. Selain itu, kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Akibatnya, desa mengalami stagnasi dalam pembangunan dan terjadi ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya (Kaffah et al., 2023). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis meritokrasi dalam pemerintahan desa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, berita media, dan dokumen resmi. Studi literatur berarti mengumpulkan dan menganalisis teori dari buku, jurnal, dan penelitian untuk mendukung ide dan gagasan penelitian (Puansah et al., n.d.).(Puansah, Pulungan, et al., 2024), (Puansah, Sukmana, et al., 2024), (Puansah, Pulungan, et al., 2024).

Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi studi kasus tertentu untuk memberikan wawasan rinci mengenai fenomena ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Teoretis Berdasarkan Sosiologi Kritis

Dalam analisis Foucault, nepotisme bukan sekadar bentuk penyimpangan moral, tetapi bagian dari cara kekuasaan bekerja dalam masyarakat. Nepotisme tidak hanya mencerminkan relasi kuasa yang tidak adil, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempertahankan dan mereproduksi dominasi melalui berbagai mekanisme yang tampak sah. Dengan demikian, memahami nepotisme dalam perspektif Foucault berarti melihatnya sebagai bagian dari sistem kekuasaan yang lebih luas, bukan sekadar tindakan individu yang menyalahgunakan jabatan (Darmansyah A et al., 2023).

Michel Foucault tidak secara spesifik membahas nepotisme, tetapi melalui konsep kekuasaan dan disiplin, ia menawarkan kerangka kritis untuk memahami praktik tersebut.

Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang tersebar dalam jaringan sosial, bukan hanya dimiliki oleh negara atau individu tertentu. Dalam konteks nepotisme, kekuasaan digunakan oleh kelompok atau keluarga tertentu untuk mempertahankan dominasi mereka, sering kali melalui cara yang tidak eksplisit tetapi tetap efektif dalam mengendalikan akses terhadap sumber daya. Nepotisme juga terkait dengan konsep "biopolitik," di mana kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga mengatur dan mengontrol individu serta populasi demi mempertahankan status quo.

Selain itu, Foucault menjelaskan bahwa institusi seperti sekolah, birokrasi, dan hukum menciptakan mekanisme disiplin yang membentuk individu agar tunduk pada norma tertentu. Dalam sistem yang korup, nepotisme dilegitimasi melalui mekanisme formal yang tampak sah, tetapi sejatinya mempertahankan struktur kekuasaan tertentu. Nepotisme juga berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang menutup akses bagi mereka di luar jaringan kekuasaan, sebagaimana dijelaskan dalam konsep panoptisisme, di mana individu merasa diawasi dan dipaksa mematuhi aturan yang menguntungkan pihak berkuasa.

Karl Marx (Mukaromah & Kusuma, 2013) dalam perspektif sosialisme menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi, di mana kejahatan dianggap sebagai produk sampingan dari kondisi ekonomi tertentu. Dalam konteks nepotisme, pandangan Karl Marx dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Determinisme Ekonomi

Marx berpendapat bahwa hubungan sosial, termasuk praktik nepotisme, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan struktur kelas. Nepotisme sering kali terjadi karena adanya kepentingan kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan sumber daya dalam lingkup keluarga atau kelompoknya.

2. Dominasi Kelas dan Reproduksi Kekuasaan

Dalam perspektif Marxian, nepotisme merupakan bentuk dari reproduksi kekuasaan kelas borjuis. Dengan memberi posisi kepada anggota keluarga atau kelompok tertentu, kelas dominan memastikan bahwa kekuasaan dan sumber daya ekonomi tetap berada dalam lingkup mereka. Hal ini menghambat mobilitas sosial dan memperkuat ketimpangan struktural.

3. Eksploitasi dan Alienasi

Nepotisme dapat dilihat sebagai bentuk eksploitasi di mana individu yang lebih kompeten tetapi tidak memiliki koneksi politik atau keluarga kehilangan kesempatan untuk memperoleh posisi yang seharusnya bisa mereka dapatkan. Ini memperkuat alienasi dalam dunia kerja, karena sistem lebih didasarkan pada hubungan daripada kompetensi.

4. Korupsi dalam Birokrasi

Berdasarkan analisis Marx terhadap kapitalisme dan negara, nepotisme dalam birokrasi merupakan bentuk korupsi sistemik yang muncul dari sistem kapitalis. Struktur negara sering kali melayani kepentingan kelas yang berkuasa, yang mempertahankan dominasi mereka dengan cara menempatkan orang-orang yang loyal kepada mereka di posisi strategis.

Dalam pandangan ini, yang membahas tindak pidana korupsi dari sudut pandang ajaran sosialisme Karl Marx, nepotisme dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme yang memungkinkan korupsi berkembang. Dengan adanya nepotisme, pengambilan keputusan menjadi tidak objektif, dan kepentingan individu atau kelompok tertentu lebih diutamakan dibanding kepentingan masyarakat luas.

Dalam perspektif Karl Marx, nepotisme bukan sekadar praktik yang merugikan individu secara moral, tetapi merupakan bagian dari sistem ekonomi dan sosial yang mempertahankan dominasi kelas berkuasa. Nepotisme dapat dijelaskan melalui konsep determinisme ekonomi, di mana struktur sosial ditentukan oleh kondisi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme, keluarga dan kelompok elit cenderung mempertahankan kendali atas sumber daya dengan menempatkan anggota mereka dalam posisi strategis, baik di pemerintahan maupun di dunia bisnis. Hal ini

memperkuat stratifikasi sosial dan menghambat mobilitas kelas bawah, karena akses terhadap jabatan publik atau peluang ekonomi lebih bergantung pada hubungan personal daripada kompetensi.

Dari perspektif teori kelas, nepotisme berfungsi sebagai alat dominasi kelas borjuis (pemilik modal) terhadap proletariat (kelas pekerja). Dengan mengontrol akses terhadap posisi penting, kelas penguasa memastikan bahwa kekayaan dan kekuasaan tetap berada di tangan mereka, sementara kelompok lain sulit untuk mendapatkan kesempatan yang setara. Akibatnya, meritokrasi menjadi terpinggirkan, dan individu dari kelas bawah sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Nepotisme juga berdampak pada alienasi dalam dunia kerja, karena individu yang lebih kompeten tetapi tidak memiliki koneksi merasa tidak dihargai. Mereka kehilangan motivasi, merasa terasing dari proses kerja, dan mengalami frustrasi akibat ketidakadilan dalam sistem yang lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan daripada kualifikasi.

Lebih jauh, nepotisme juga dapat dianalisis melalui konsep hegemoni ideologi, sebagaimana dikembangkan oleh Antonio Gramsci dalam pemikiran Marxis. Kelas penguasa tidak hanya mempertahankan kekuasaannya melalui kontrol ekonomi, tetapi juga melalui kontrol budaya dan ideologi. Dalam banyak masyarakat, nepotisme dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan diterima sebagai bagian dari budaya, sehingga sulit untuk dilawan. Media, pendidikan, dan kebijakan publik sering kali memperkuat narasi bahwa kesuksesan seseorang lebih banyak ditentukan oleh koneksi daripada kerja keras dan kompetensi. Hal ini membuat masyarakat cenderung menerima nepotisme tanpa menyadari bahwa praktik tersebut sebenarnya menghambat keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan.

Dengan demikian, menurut Karl Marx, nepotisme bukan hanya merupakan penyimpangan etika dalam birokrasi, tetapi juga bagian dari sistem yang lebih besar yang melanggengkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasinya, diperlukan perubahan struktural yang lebih mendasar, seperti reformasi sistem perekrutan berbasis meritokrasi, peningkatan kesadaran kelas dalam masyarakat, serta kebijakan publik yang lebih berpihak pada transparansi dan keadilan sosial.

Menurut sosiologi kritis, nepotisme dalam pemerintahan desa adalah manifestasi dari struktur kekuasaan yang lebih luas daripada hanya tindakan individu yang tidak etis. Sementara Foucault menekankan bahwa nepotisme adalah metode yang digunakan kelas berkuasa untuk mempertahankan hegemoninya, pendekatan Marx menunjukkan bahwa nepotisme adalah alat yang digunakan kelas berkuasa untuk mempertahankan hegemoninya. Oleh karena itu, pemberantasan nepotisme membutuhkan lebih dari sekedar peraturan pemerintah; itu juga

membutuhkan perubahan struktural dalam bagaimana kekuasaan didistribusikan dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang masalah ini.

Manifestasi Nepotisme dalam Pemerintahan Desa

Manifestasi nepotisme dalam pemerintahan Desa Serosah 2015-2021 (Kaffah et al., 2023) terlihat dalam pengisian jabatan yang didominasi keluarga dan orang dekat kepala desa (familism dan favoritism). Perekrutan perangkat desa, pengelolaan BUMDes, PAUD, MDA, organisasi kepemudaan, dan SPSI dilakukan tanpa transparansi, lebih mengutamakan loyalitas daripada kompetensi. Kepala desa juga menyalahgunakan kewenangan dengan memberhentikan perangkat desa yang tidak mendukungnya dan mengontrol sumber daya ekonomi serta politik desa. Akibatnya, terjadi ketimpangan jabatan, konflik sosial, serta melemahnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa.

Manifestasi nepotisme dalam pemerintahan Desa Cinta Rakyat terjadi dalam bentuk pemberian keuntungan atau jabatan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau merit (Hasibuan & Ivanna, 2024). Praktik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Dinamika Kekuasaan Lokal – Kedekatan dengan pemegang kekuasaan menjadi faktor utama dalam distribusi sumber daya dan jabatan di pemerintahan desa.
2. Struktur Sosial Ekonomi – Kelompok yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi mendominasi proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
3. Budaya Politik – Pola patronase, klienelisme, serta rendahnya kesadaran terhadap etika pemerintahan dan tata kelola yang baik mempermudah praktik nepotisme.

Kemudian Manifestasi nepotisme dalam pemerintahan desa terlihat dalam seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Kepala Desa Plumbon diduga melakukan nepotisme dengan merekomendasikan menantunya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, meskipun bukan peserta dengan nilai tertinggi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan publik, karena peserta dengan peringkat pertama tidak terpilih (“No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” 2021).

Permasalahan ini muncul akibat kewenangan kepala desa dalam memberikan rekomendasi kepada camat terkait calon perangkat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021. Namun, publik menganggap bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan, sehingga menimbulkan polemik yang berujung pada revisi regulasi menjadi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81

Tahun 2022. Regulasi baru ini menetapkan bahwa calon perangkat desa yang direkomendasikan harus mempertimbangkan nilai tertinggi hasil seleksi

Dampak Praktik Nepotisme

Praktik nepotisme dalam pemerintahan Desa Serosah 2015–2021 (Kaffah et al., 2023) berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Jabatan strategis diberikan kepada keluarga dan orang dekat kepala desa tanpa mempertimbangkan kompetensi, menyebabkan ketidakadilan, pemusatan kekuasaan, serta penyalahgunaan wewenang. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran desa, termasuk tidak dibayarkannya gaji perangkat desa dan buruknya pengelolaan BUMDes, menghambat pembangunan ekonomi desa.

Selain itu, pelayanan publik menurun akibat pengangkatan pejabat yang tidak kompeten, terutama di sektor pendidikan seperti PAUD dan MDA. Konflik sosial meningkat akibat ketimpangan dalam perekrutan jabatan, di mana masyarakat yang tidak sejalan dengan kepala desa disingkirkan. Praktik ini juga melanggar prinsip *good governance* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara keseluruhan, nepotisme di Desa Serosah menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan, dan merusak tata kelola pemerintahan desa. Reformasi dalam sistem rekrutmen dan pengelolaan pemerintahan desa sangat diperlukan untuk mencegah berlanjutnya praktik ini.

Nepotisme dalam pemerintahan desa melemahkan efektivitas pembangunan karena jabatan diberikan berdasarkan hubungan keluarga, bukan kompetensi. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat akibat ketidakadilan dalam distribusi jabatan dan sumber daya. Selain itu, nepotisme memicu konflik internal antara kelompok yang diuntungkan dan dirugikan, mengganggu stabilitas pemerintahan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas semakin memperburuk kondisi, meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Praktik ini juga memperkuat budaya politik yang tidak demokratis, di mana kekuasaan hanya berputar dalam lingkaran keluarga dan orang dekat. Secara keseluruhan, nepotisme menghambat pembangunan, memperburuk konflik sosial, dan melemahkan tata kelola pemerintahan desa (Hasibuan & Ivanna, 2024).

Nepotisme menurunkan profesionalisme dan integritas dengan menempatkan individu tidak kompeten dalam jabatan penting, sehingga efektivitas kerja menurun. Praktik ini merusak tata kelola yang adil dan transparan, menciptakan ketidakadilan, serta memicu kekacauan dan kehancuran organisasi. Selain itu, nepotisme menyebabkan ketidakstabilan sosial, menurunkan kepercayaan publik, dan memicu konflik. Dalam perspektif hadis, nepotisme adalah

penyimpangan moral yang merusak nilai keadilan dan dikaitkan dengan tanda-tanda kehancuran sosial dan akhirat. Secara keseluruhan, nepotisme melemahkan tata kelola, merusak kepercayaan, dan memperburuk stabilitas sosial (Syatar et al., 2020).

Nepotisme berdampak negatif pada ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi, praktik ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, meningkatkan korupsi, serta menurunkan kualitas kerja dan pembangunan. Secara sosial, nepotisme memperkuat ketimpangan, memarginalkan masyarakat yang tidak memiliki koneksi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam politik, nepotisme menciptakan kekuasaan yang rapuh, memperburuk pelayanan publik, menghambat reformasi, serta meningkatkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Secara keseluruhan, nepotisme melemahkan tata kelola pemerintahan dan memperburuk stabilitas sosial serta politik (Saebani & Farhan Mubarak, 2024).

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dikemukakan nepotisme dalam pemerintahan desa memiliki dampak yang luas dan merugikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dampak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Nepotisme dalam pemerintahan desa menyebabkan ketidakadilan dalam pengangkatan jabatan, di mana posisi strategis diberikan kepada keluarga kepala desa tanpa mempertimbangkan kompetensi. Hal ini memusatkan kekuasaan, melemahkan demokrasi desa, serta menghambat transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan anggaran yang rentan disalahgunakan. Selain itu, buruknya pengelolaan BUMDes akibat kepemimpinan yang tidak kompeten turut menghambat pertumbuhan ekonomi desa.

2. Dampak terhadap Pelayanan Publik

Nepotisme dalam pemerintahan desa berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan dan administrasi desa, akibat pejabat yang tidak kompeten. Selain itu, perekrutan aparatur desa yang didasarkan pada hubungan keluarga mengakibatkan rendahnya profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif dan tidak optimal.

3. Dampak terhadap Stabilitas Sosial dan Kepercayaan Publik

Nepotisme meningkatkan ketimpangan sosial, memicu konflik antara kelompok yang diuntungkan dan dirugikan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akibat ketidakadilan dan kurangnya transparansi.

4. Dampak terhadap Ekonomi Desa

Nepotisme dalam pemerintahan desa menyebabkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya, di mana anggaran lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan kelompok tertentu daripada pembangunan yang merata. Akibatnya, kualitas pembangunan menurun karena individu yang tidak kompeten gagal mengelola program secara efektif, menghambat pertumbuhan ekonomi desa.

5. Dampak terhadap Politik dan Demokrasi Desa

Nepotisme memperkuat budaya politik yang tidak demokratis, di mana kekuasaan diwariskan dalam lingkaran keluarga atau orang terdekat, menghambat sirkulasi kepemimpinan yang sehat. Selain itu, kepala desa dan perangkat yang diangkat tanpa meritokrasi cenderung mempertahankan status quo, melemahkan reformasi serta menghambat inovasi dalam pemerintahan desa.

6. Dampak dalam Perspektif Etika dan Agama

Nepotisme melanggar prinsip *good governance* karena bertentangan dengan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, dari perspektif moral dan agama, nepotisme dianggap sebagai penyimpangan yang merusak nilai keadilan dan mencerminkan kemunduran sosial.

Nepotisme dalam pemerintahan desa memiliki dampak yang sangat negatif terhadap tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, stabilitas sosial, ekonomi, serta politik desa. Praktik ini menciptakan ketidakadilan, melemahkan profesionalisme, meningkatkan konflik sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Untuk menghindari dampak yang lebih buruk, reformasi dalam sistem rekrutmen aparatur desa dan pengelolaan pemerintahan desa sangat diperlukan. Implementasi prinsip *good governance*, transparansi, dan meritokrasi harus diperkuat untuk memastikan pemerintahan desa yang lebih baik dan berkeadilan.

Faktor Penyebab Nepotisme

Secara umum Administrasi yang buruk, penegakan hukum yang lemah, dan gaji yang rendah adalah penyebab nepotisme. Kurang pendidikan moral, budaya feodal, dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan mendorong praktik ini, sementara kurangnya pengawasan masyarakat membuatnya sulit dihilangkan (Hendarti & Rakhmawati, 2017), (Jamal, 2016), (Martin et al., 2021), (Nurfaida, 2013), (Cahyadewi et al., 2023), (Pemerintahan et al., 2025), (Wesly, 2023).

Nepotisme dalam pemerintahan Desa Serosah disebabkan oleh beberapa faktor utama. Kepala desa mengutamakan keluarga dan orang dekat dalam pengisian jabatan (*familism* &

kinshipism) tanpa mempertimbangkan kompetensi. Selain itu, favoritisme dan penyalahgunaan wewenang digunakan untuk memperkuat kontrol politik dan ekonomi di desa. Kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam rekrutmen jabatan semakin memperburuk situasi, ditambah dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Budaya nepotisme yang telah mengakar juga membuat praktik ini sulit diberantas. Kombinasi faktor-faktor ini menghambat tata kelola pemerintahan desa yang baik dan merugikan masyarakat (Kaffah et al., 2023).

Nepotisme dalam pemerintahan desa disebabkan oleh dinamika kekuasaan lokal, di mana kepala desa mengangkat keluarga atau orang dekat untuk mempertahankan kontrol. Struktur sosial dan ekonomi juga berperan, dengan kelompok dominan memanfaatkan nepotisme untuk menjaga akses terhadap sumber daya. Budaya politik patronase yang mengutamakan loyalitas dibanding kompetensi semakin memperkuat praktik ini. Kurangnya transparansi dan pengawasan memungkinkan rekrutmen berbasis nepotisme tanpa konsekuensi hukum. Selain itu, masa jabatan kepala desa yang panjang membuka peluang lebih besar untuk penyalahgunaan wewenang. Faktor-faktor ini menciptakan sistem pemerintahan yang tidak adil, melemahkan tata kelola desa, dan menghambat pembangunan (Hasibuan & Ivanna, 2024).

Nepotisme terjadi karena kurangnya profesionalisme, di mana jabatan diberikan bukan berdasarkan kompetensi, tetapi karena hubungan keluarga. Ketidakadaan integritas membuat individu yang dipilih cenderung mementingkan kepentingan pribadi. Ambisi mempertahankan kekuasaan juga mendorong praktik ini untuk memastikan loyalitas. Selain itu, fanatisme dan sikap egois membuat seseorang lebih mengutamakan keluarga daripada keadilan. Dalam perspektif hadis, nepotisme terjadi karena hilangnya amanah dan moralitas, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada tanggung jawab kepada masyarakat (Syatar et al., 2020).

Nepotisme terjadi akibat budaya kekerabatan dan sistem patronase yang mengutamakan hubungan pribadi dibanding meritokrasi. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya transparansi dalam rekrutmen memungkinkan praktik ini terus berlangsung. Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi digunakan untuk mempertahankan kekuasaan serta mengontrol sumber daya. Rendahnya kesadaran etika dan integritas juga memperkuat praktik nepotisme, yang pada akhirnya melemahkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan korupsi (Saebani & Farhan Mubarak, 2024).

Dari berbagai penelitian tersebut dapat diketahui bahwa nepotisme dalam pemerintahan desa disebabkan oleh beberapa faktor utama:

1. Dinamika Kekuasaan Lokal, Kepala desa mengangkat keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan kontrol politik dan ekonomi.
2. Budaya Keekerabatan dan Patronase, Hubungan pribadi lebih diutamakan dibanding kompetensi, sehingga meritokrasi diabaikan.
3. Kurangnya Transparansi dan Pengawasan, Rekrutmen jabatan tidak terbuka, dan lemahnya kontrol dari pemerintah daerah memungkinkan praktik nepotisme berlangsung tanpa konsekuensi hukum.
4. Ambisi Kekuasaan dan Penyalahgunaan Wewenang, Kepala desa menggunakan nepotisme untuk memastikan loyalitas dan memperkuat posisinya.
5. Faktor Sosial dan Ekonomi, Kelompok dominan memanfaatkan nepotisme untuk mengontrol sumber daya dan mempertahankan akses ekonomi.
6. Lemahnya Etika dan Integritas, Kurangnya profesionalisme, hilangnya amanah, serta rendahnya kesadaran moral mendorong individu untuk lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarga.

Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan tata kelola pemerintahan desa yang buruk, melemahkan sistem meritokrasi, serta menghambat pembangunan dan keadilan sosial.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Dinamika kekuasaan lokal, budaya patronase, dan kekurangan pengawasan menyebabkan nepotisme dalam pemerintahan desa. Praktik ini memengaruhi tata kelola pemerintahan desa, kualitas pelayanan publik, ketimpangan sosial, dan pembangunan. Menurut sosiologi kritis, nepotisme adalah lebih dari sekadar tindakan individu yang menyalahgunakan posisi. Ini adalah bagian dari sistem kekuasaan yang mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu dengan mekanisme yang tampaknya legal.

Nepotisme memperkuat stratifikasi sosial dalam ekonomi dan politik dengan menghambat meritokrasi dan menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya. Selain itu, praktik ini menyebabkan konflik internal, memperburuk kebijakan desa, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan reformasi pada sistem perekrutan aparatur desa, meningkatkan transparansi, dan menerapkan prinsip pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Linanda. (2020). Praktik Nepotisme Sebagai Perilaku Koruptif Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Berdasarkan Perspektif Masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* IV(1), 40–50.
- Cahyadewi, A. A., Az' zahra, N. D., & Salvina, Z. (2023). Pengaruh Sistem Computer Assisted Test (CAT) Terhadap Pelanggaran Etika dan Praktik Nepotisme dalam Seleksi CPNS. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(2), 15–25.
- Darmansyah A, A. S., Arlin, A., & Kamaruddin, S. A. (2023). Sosiologi Kritis Teori Sosiologi Michel Foucault. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5094>
- Fajar, S. Al, & K, M. Z. A. (2023). *Nepotisme Sebagai Unsur Budaya Korupsi Politik Di Indonesia*. 1–13.
- Habibullah, A. (2024). *Model Seleksi Terbuka Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Demak No . 11 Tahun 2022 Village Apparatus Open Selection Model Based on the Regent Regulation of Demak Regency No . 11 of 2022. 11*. <https://doi.org/10.33701/cc.v4i2.4718>
- Hariyanto. (2012). Priyayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN): Studi Status Group di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Aspirasi*, 3(2), 118.
- Hasibuan, R. Y., & Ivanna, J. (2024). *Dinamika Politik Lokal : Nepotisme dan Konflik Internal di Pemerintah Desa Cinta Rakyat*. 06(04), 20580–20585.
- Hendarti, R., & Rakhmawati, L. (2017). Pengaruh Nepotisme Terhadap Keheningan, Keterasingan Dan Komitmen Organisasional Pada Karyawan Perusahaan Perkebunan Swasta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, 2(1), 26–38.
- Jamal, R. (2016). Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Problem Dan Solusinya). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2). <https://doi.org/10.30984/as.v7i2.44>
- Kaffah, F., Desbanita, I., & Hafizah, A. (2023). Nepotisme Dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021 Nepotism in Village Government: A Case Study of Government Administration In Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(01), 103–113. <https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.449>
- Martin, B., Rusbiyanti, S., & Iswati, R. (2021). Bunishing Bureaucracy System Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Kkn). *Prosiding Conference on Research and Community Services*, 3(1), 607–620. <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/CORCYS/article/view/2062/1682>
- Mukaromah, D. A., & Kusuma, L. I. (2013). Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Marx. *Recidive*, 2(2), 178–184.
- No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. (2021). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

- Nurfaida, D. (2013). KKN, Supremasi Hukum Dan Moral Islam Oleh : Nurfaida Abstrak. *Jurnal Al-'Adl*, 6(Nurfaida, Djaenab), 92–101.
- Nurul, A. (2022). Kebijakan Anti Nepotisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *OSF Preprints*, 5(3), 1–23.
- Pemerintahan, D. I., Debora, B., Moningka, N., Setiabudhi, D. O., & Rumokoy, D. A. (2025). *Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. 14(5).
- Puansah, I., Muhammadiyah, U., & Selatan, T. (n.d.). *Studi Literatur : Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Irman Puansah*. 8, 778–787.
- Puansah, I., Pulungan, D. S., & Sahbana, A. (2024). Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 340. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.340-348>
- Puansah, I., Sukmana, O., & Soedarwo, V. S. D. (2024). *Political Dynasties in Village Government and Their Impact on Society and Development*. 5(2), 119–136.
- Saebani, B. A., & Farhan Mubarak, A. (2024). Nepotisme Politik Kekuasaan dan Upaya Pemecahannya. *Polhum Sovereignty Law and Diplomatic Politics*, 1(1), 10–19. <https://erapublikasi.id/jurnal.erapublikasi.id/index.php/PLSDP/article/view/851>
- Syatar, A., Islam, U., Alauddin, N., & Amiruddin, M. M. (2020). Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan. *Kuriositas*, 13(September).
- Tory, T. F., & Hanum, R. A. (2025). *Nepotisme dan Korupsi di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika*. 3.
- Wesly, S. A. A. (2023). Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Volume 2 Nomor 1 (2023) 74. *Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 11576–11584. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>